

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 30 Desember 2014

Subyek : SDA

Hal : 13

SUMBER DAYA ALAM : TIGA REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH

Pertemuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memberi tiga rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka menagih keseriusan pemerintah soal penanganan konflik sumber daya alam, meminta pembebasan dan penghentian kriminalisasi aktivis, masyarakat, dan pembela lingkungan, serta meninjau ulang perizinan dan kebijakan terkait eksploitasi sumber daya alam.

Sepanjang tahun 2014, ratusan orang dikriminalisasi saat mempertahankan hak hidup, kelestarian alam, dan menolak eksploitasi alam untuk pembangunan ataupun industri.

"Jumlah ini baru sebagian kecil. Sejumlah kasus kriminalisasi lain masih kami data," kata Kepala Unit Pendidikan Eksekutif Nasional Walhi M Islah dalam lokakarya dan pelatihan anggota Walhi, di Bandar Lampung, Senin (29/12).

Di Kapuas, Kalimantan Tengah, sejumlah aktivis lingkungan dikriminalisasi saat menolak eksploitasi lahan untuk perkebunan sawit. Di Pulau Bangka, Sulawesi Selatan, masyarakat yang memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Urusan Niaga ditangkap dan dipidana 1 tahun 10 bulan dengan tuduhan perusakan alat berat.

Hal serupa terjadi di Bali. Empat aktivis lingkungan yang menolak reklamasi Teluk Benoa sempat ditahan beberapa hari oleh polisi. Penahanan mereka ditangguhkan.

"Rekan kami dikriminalisasi dengan tuduhan memasang spanduk provokatif di depan Kantor Gubernur Bali," kata perwakilan Walhi Bali, Gilang.

Sikap Walhi, kata Islah, sebenarnya tidaklah anti pembangunan hotel, permukiman, atau industri. Namun, mereka menolak pembangunan yang merusak lingkungan.

Perwakilan Walhi Jawa Timur, Ony Mahardiaka, menuturkan, tiga warga Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur, dipidanakan dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan perusakan saat menolak pembangunan hotel. "Tidak hanya itu, salah satu warga bahkan dituntut perdata sebesar Rp 30 miliar karena kasus tersebut," katanya.

Pembangunan hotel ditolak warga karena mengancam kelestarian lingkungan dan sumber air yang mengalir di Desa Bulukerto, Bumi Aji, dan Sidomulyo di Kecamatan Bumi Aji. "Sesuai Peraturan Daerah RTRW Kota Batu, tidak boleh berdiri bangunan pada radius 200 meter dari sumber air atau berada di kawasan atas lindung. Faktanya, pemerintah justru mengeluarkan izin pendirian bangunan hotel yang berjarak 150 meter dari sumber air," ungkapnya. Kriminalisasi pejuang lingkungan juga terjadi di daerah lain. (GER).